



Peran Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kabupaten Pesisir Selatan

Annisa Fitri^{1*}, Rinawati², Nur Saadah Khudri³, Nika Saputra⁴,
Rainal Baguno⁵

^{1, 2, 3, 4} Universitas Ekasakti, Padang

*e-mail: fitriannisa@unespadang.ac.id

Abstract

This research was conducted to understand the role of female Nagari Guardians in realizing Sustainable Development Goals (SDGs) in two Nagari in Pesisir Selatan Regency, although since 2007 there has been a law that allows women to become village heads. However, in reality there are still very few women who lead nagari in Minangkabau, as evidenced by the 182 nagari in Pesisir Selatan Regency, there are only 2 female Nagari Wali. The research methodology used was qualitative using in-depth interview techniques, observation and document analysis. The results of the research showed that female Nagari Wali applied situational leadership, adjusting their leadership style and actions based on the situation. Their role in realizing the SDGs includes decision making, village development planning, village data collection to prioritize national programs, and adapting to new habits through the "Independent Village" concept. However, there are several problems faced, including limited resources, lack of awareness and understanding of Wali Nagari regarding the program, limited technology, less than optimal involvement of related parties, and lack of technical and managerial capacity. Social and demographic changes are also factors that influence the implementation of their roles. This research provides an illustration that although female Nagari Mayors have an important role in realizing the SDGs, further steps are still needed to overcome the various problems faced, including capacity building and involvement of related parties.

Keywords: Role; Leadership; Female Nagari Guardian; Village SDGs

Received October 2, 2023

Revised October 28, 2023

Published November 15, 2023



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2023 by author.

Pendahuluan

Perempuan Minangkabau memiliki peran signifikan dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik di masyarakat mereka. Tradisi matriarki yang dianut memperkuat peran perempuan dalam memimpin dan mengambil keputusan di tingkat keluarga dan komunitas. (A. Fitri, Frinaldi, and Erianjoni 2019) Meskipun undang-undang sejak tahun 2007 memungkinkan perempuan menjadi kepala desa, kenyataannya masih sedikit perempuan yang memimpin nagari di Minangkabau. Dari 182 Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, hanya terdapat 2 Wali Nagari Perempuan, dimana tinggal 1 orang wali nagari perempuan defenitif yakni Nagari Lalang Panjang. Sedangkan untuk Nagari Tapan masa jabatannya baru selesai pada awal tahun 2023. SDGS Desa menjadi penting karena di desa atau nagari terdapat kebutuhan dan potensi yang berbeda dengan di kota, sehingga perlu ada penyesuaian dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kepemimpinan wali nagari, termasuk walinagari perempuan, memiliki peran penting dalam mewujudkan SDGS Desa, terutama dalam hal memimpin dan menggerakkan masyarakat setempat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa dan mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana kepemimpinan walinagari dapat menentukan prioritas pembangunan yang berkelanjutan di wilayah mereka. Penelitian ini

dirumuskan untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran wali nagari perempuan dalam mewujudkan SDGs Desa di Kabupaten Pesisir Selatan dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan wali nagari perempuan dalam mewujudkan SDGs desa. Dengan penelitian ini, diharapkan akan terjadi pemahaman yang lebih baik mengenai peran penting kepemimpinan wali nagari perempuan dalam memajukan pembangunan desa secara berkelanjutan, dan mendorong pengembangan kebijakan yang dapat memperkuat peran mereka dalam mencapai SDGs. (Mahmud 2022). Pendekatan pemecahan masalah yang dapat dilakukan terkait peran kepemimpinan wali nagari perempuan dalam mewujudkan SDGs desa adalah Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan perempuan melalui pendidikan dan keterampilan yang memadai untuk memimpin nagari dan mencapai target SDGs yang meliputi pemahaman tentang konsep pembangunan berkelanjutan, manajemen keuangan, kepemimpinan, partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial. Dengan demikian kepemimpinan perempuan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan. Mereka dapat memobilisasi masyarakat dan memotivasi mereka untuk terlibat aktif dalam program pembangunan Nagari. Kepemimpinan wali nagari perempuan dapat membantu mempromosikan gender mainstreaming dalam program pembangunan di Nagari, wali nagari perempuan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat nagari, dalam menghadapi tantangan mereka dapat mengatasi tantangan ini dengan cara mengambil inisiatif, membangun jaringan dan memperkuat partisipasi masyarakat. Peran kepemimpinan wali nagari perempuan dalam mewujudkan SDGs desa telah diakui secara internasional sebagai suatu kontribusi yang signifikan bagi pembangunan berkelanjutan dalam Agenda PBB pada tahun 2030. (Wahyuni 2018) Namun, meskipun sudah ada beberapa inisiatif dan program untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan di tingkat desa, tantangan yang dihadapi tetap cukup besar seperti kurangnya dukungan dan pemahaman terhadap pentingnya peran kepemimpinan perempuan dalam mewujudkan SDGs desa. Oleh karena itu, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan peran kepemimpinan wali nagari perempuan dalam mewujudkan SDGs desa, antara lain dengan memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, serta mengembangkan program-program pembangunan desa. (A. H. Iskandar 2020). Kebaharuan penelitian ini terletak pada seberapa besar partisipasi masyarakat dalam mewujudkan SDGs di desa, serta bagaimana kepemimpinan wali nagari dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat tersebut. Penelitian ini dapat mengevaluasi bagaimana kepemimpinan wali nagari dapat berkontribusi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program-program SDGs di desa, serta mengevaluasi strategi pengembangan kepemimpinan wali nagari yang efektif dalam mewujudkan SDGs desa, termasuk pelatihan dan pengembangan kapasitas, pendanaan, dan dukungan kebijakan pemerintah. selain itu Penelitian ini dapat mengevaluasi bagaimana perbedaan gender dapat mempengaruhi peran kepemimpinan wali nagari dalam mewujudkan SDGs desa, serta bagaimana kepemimpinan wali nagari perempuan dan laki-laki dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam mengenai Peran Kepemimpinan wali nagari perempuan dalam mewujudkan sustainable development Goals (SDGs) Desa di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tinjauan Kepustakaan

Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi bawahan atau kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Kepemimpinan dapat terjadi di mana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tercapainya suatu tujuan tertentu (Mayasiana and Hofia 2022). Kata Kunci Sebagai Seorang Pemimpin adalah Mengarahkan, membimbing, memberi contoh (suri tauladan), mempengaruhi, mengkocing, memfasilitasi, mendukung, mendorong, memotivasi, mendelegasi, memiliki visi, menggerakkan, memberdayakan, menghargai, kepedulian, persuasi, membuat orang lain taat, berinteraksi, ekspektasi, mengambil resiko, menjaga

integritas, membangun iklim yang kondusif, percaya diri, dll. Pentingnya Pemimpin Agar tujuan organisasi tercapai, agar yang dipimpin nyaman bekerja dalam mencapai tujuan organisasi. agar organisasi yang dipimpin dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. agar memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dinamis, harmonis/seirama, dan lincah dalam menyelesaikan masalah dan menghadapi tantangan serta dalam menanggapi aspirasi yang berkembang. (Wulandari and Frinaldi 2020).

Tipe Kepemimpinan

1. Kepemimpinan Klasik

Kepemimpinan klasik adalah kepemimpinan yang ditandai oleh sifat dominatif, direktif, otoritatif, dan para pengikut harus patuh/taat melaksanakan perintah pimpinan dan tertutup pertanyaan. Sifat-sifat tersebut ada karena pemimpinlah satu-satunya otoritas yang berhak menafsirkan kebenaran yang 9 sah. Kerajaan-kerajaan dan negara-negara totalitarian pada umumnya menerapkan paradigma kepemimpinan klasik (Uni Soviet/semua presiden sebelum Garberchov, Jerman/dibawah Hitler, Singapore/Lee Kwan Yew, dsb.). Jadi, pemimpin mendekte pengikut “apa yang harus dilakukan” tanpa konsultasi.

2. Kepemimpinan Berdasarkan Sifat Pembawaan

Teori ini meyakini bahwa pemimpin itu dilahirkan yang berarti pembawaan, bukan dipersiapkan/didikan. Sifat pembawaan pemimpin meliputi kualitas jiwa dan raga yang dapat digunakan untuk membedakan pemimpin dan pengikut. Contoh sifat pembawaan misalnya: kecerdasan intelektual, tubuh yang gagah dan tinggi, kepercayaan diri yg tinggi, dan tingkat energi.

3. Kepemimpinan Berdasarkan Perilaku

Teori ini meyakini bahwa perilaku pemimpin secara langsung mempengaruhi efektivitas kerja yang dipimpin, dan pemimpin dapat dipersiapkan/ dipelajari, bukan dilahirkan. Tiga jenis gaya perilaku pemimpin yaitu otoritarian, demokratik, dan pasif/pembiaran. Ketiganya dapat dipecahpecah lagi lebih rinci. (SARI 2022)

4. Kepemimpinan Kharismatik

Kepemimpinan karismatik adalah jenis kepemimpinan yang mengandalkan pada karisma seorang pemimpin. Karisma seorang pemimpin ditunjukkan oleh kewibawaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi yang dipimpin. Kewibawaan bersumber pada aspek psikologis dan fisik seorang pemimpin.

5. Kepemimpinan Transaksional

Kepemimpinan transaksional adalah jenis kepemimpinan yang mengandalkan transaksi antara pemimpin dan yang dipimpin. Artinya, ada kesepakatan atau tawar menawar antara pemimpin dan yang dipimpin (politik dagang sapi). Pemimpin meminta yang dipimpin melakukan sesuatu dan yang dipimpin akan diberi imbal jasa jika yang dipimpin telah melaksanakan perintah sang pemimpin.

6. Kepemimpinan Situasional

Kepemimpinan situasional dapat diartikan bahwa keefektifan gaya kepemimpinan tertentu tergantung pada situasi. Jika situasi berubah, gaya kepemimpinan yang digunakan juga harus berubah. Jadi, tidak ada satu gaya kepemimpinan terbaik yang berlaku untuk semua situasi. Situasi adalah lingkungan yang berada di sekitar pemimpin, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih jenis kepemimpinan tertentu. Situasi yang dimaksud dapat berupa: orang yang dipimpin, jenis pekerjaan, waktu, sistem/ struktur (politik, ekonomi, teknologi, sosial, dsb.), dan kultur. Dalam melakukan “interaksi” dengan yang dipimpin, seorang pemimpin selalu memilih “cara” memimpin yang paling tepat berdasarkan visi yang jelas, situasi yang dipimpin dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Dengan memper-timbangkan tiga hal ini, seorang pemimpin dapat menggunakan salah satu atau kombinasi cara-cara memimpin berikut: mengarahkan, memberi contoh, membimbing, mempengaruhi, mengkocing, memfasilitasi, mendukung, mendorong, memotivasi, mendelegasi, dan/atau cara lain yang tepat. Menurut teori kepemimpinan situasional, perilaku pemimpin yang efektif juga tergantung pada tingkat kesiapan yang dipimpin. Kesiapan yang dimaksud adalah sejauhmana yang dipimpin memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menyelesaikan suatu tugas. Jika kesiapan

yang dipimpin meningkat, disarankan kepemimpinan bergerak secara gradual dari direktif (dominatif) ke kocing, ke dukungan, ke partisipasi dan akhirnya ke delegasi. (Kotler 2008)

7. Kepemimpinan Visioner/ Transformasional

Kepemimpinan visioner/transformatasional adalah kepemimpinan yang mengandalkan visi pemimpin sebagai inspirasi untuk mengarahkan pengikutnya. Tiga hal yang harus dilakukan oleh pemimpin transformasional: (1) menyadari perlunya perubahan, (2) menciptakan visi baru, (3) melembagakan perubahan. Dalam literatur, paradigma ini sering disebut paradigma ideal khususnya untuk melakukan transformasi organisasi.

8. Kepemimpinan Organik

Dalam kepemimpinan organik, pemimpin tidak menjadi figur sentral, akan tetapi kelompok secara keseluruhan menjadi kuncinya. Konsensus kelompok yang bisa menentukan siapa yang seharusnya menjadi pemimpin dan berapa lama. Jadi, kepemimpinan tak perlu bersarang pada individu tertentu, meskipun individu tersebut menduduki peran kepemimpinan untuk tujuan tertentu. Kompleksitas masalah yang dihadapi oleh organisasi membuat pemimpin sentral tunggal tidak lagi relevan. Perspektif dan kemampuan majemuk sangat diperlukan untuk memecahkan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh suatu institusi/ organisasi.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Visi baru untuk pembangunan berkelanjutan Konsep SDGs merupakan hasil dari kegiatan konferensi di Rio de Janeiro yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2012 berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini diselenggarakan dengan maksud dapat mencapai tujuan bersama yakni mampu menjaga keseimbangan tiga hal pokok dalam pembangunan berkelanjutan meliputi lingkungan, sosial dan ekonomi. 1 Guna mencapai tiga hal pokok dalam pembangunan berkelanjutan tersebut SDGs mempunyai 5 asas utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan untuk mewujudkan tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa pengentasan kemiskinan, mencapai kesetaraan serta mengatasi perubahan iklim. Ke-17 tujuan global dari SDGs tersebut di antaranya: 1) tanpa kemiskinan. Seluruh dunia harus terbebas dari belenggu kemiskinan. 2) tanpa kelaparan. Kelaparan tidak terjadi lagi, ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mempertahankan budidaya pertanian yang berkelanjutan. 3) kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang memadai tanpa pandang usia serta mendorong kesejahteraan hidupnya. 4) pendidikan berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan. 5) Kesetaraan gender. Mengikutsertakan kaum ibu dan perempuan dalam setiap kegiatan yang bermanfaat sehingga kesetaraan gender dapat tercapai. 6) air bersih dan sanitasi. Memastikan semua orang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. 7) energi bersih dan terjangkau. Semua orang dapat mengakses sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern. 8) pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Perkembangan ekonomi semakin pesat dan lapangan kerja tersedia untuk semua orang sehingga mampu mendapatkan kehidupan yang layak. 9) industri, inovasi dan infrastruktur. Industri dan infrastruktur berkembang pesat, berkualitas, penuh inovasi dan berkelanjutan. 10) mengurangi kesenjangan. Mewujudkan kesetaraan di seluruh Negara di dunia. 11) keberlanjutan kota dan komunitas. membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan serta berkelanjutan. 12) konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Keberlangsungan konsumsi serta pola produksi terjamin. 13) aksi terhadap iklim. Melakukan tindakan yang cepat dalam mengatasi perubahan iklim dan mengantisipasi dampaknya. 14) kehidupan bawah laut. Menjaga kelestarian laut dan mempertahankan eksistensi sumber daya laut demi perkembangan pembangunan berkelanjutan. 15) kehidupan di darat. Menjaga kelestarian ekosistem darat, mengelola dan memperhatikan kelestarian hutan, memulihkan degradasi tanah dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. 16) institusi peradilan yang kuat dan kedamaian. Menciptakan

perdamaian dalam masyarakat, akses keadilan tersedia bagi semua orang maupun lembaga tanpa pandang bulu, membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh lapisan. 17) menjalin kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan. Memperkuat implementasi dan membangkitkan kembali kerjasama global demi mencapai pembangunan berkelanjutan. (Milennial and Desa n.d.).

Pilar-pilar SDGs

Menurut Sachs dalam bukunya Armida Salsiah Alisjahbana, dkk konsep dasar pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memiliki keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, sosial, lingkungan dan pemerintahan. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang pesat harus diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata melalui terseleggaranya lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang layak. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi tersebut harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dengan tidak membuat udara menjadi tercemar atau menghabiskan sumber 15 daya alam. Terakhir, eksistensi dari pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan demi tercapainya sasaran-sasaran yang dikehendaki. Karena seperti yang kita ketahui bahwa fungsi-fungsi inti dalam kehidupan hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah, seperti regulasi, jaminan kesehatan nasional dan infrastruktur. Konsep utama tersebut melahirkan turunan yang bisa dimaknai sebagai pilar pertama dari SDGs yakni disebut dengan 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership). Pilar 5P ini dapat dimaknai sebagai berikut, People: Lahirnya SDGs ini bertujuan untuk menegaskan bahwa semua manusia harus terbebas dari belenggu kemiskinan, kelaparan, mendapatkan kedudukan yang setara serta mendapatkan hak untuk hidup secara bermartabat; Planet: SDGs berusaha untuk menjaga bumi dari dampak buruk akibat kegiatan manusia meliputi perubahan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran sehingga kebutuhan masa depan masih dapat terpenuhi; Prosperity: SDGs hadir untuk memastikan kesejahteraan hidup semua umat manusia, mampu mencukupi kebutuhannya serta dapat hidup secara harmonis berdampingan dengan alam; Peace: tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan keamanan sosial, begitupun sebaliknya, tidak ada perdamaian dan keamanan sosial tanpa pembangunan berkelanjutan; Partnership: kesuksesan pembangunan berkelanjutan hanya dapat diraih melalui kerja sama global yang kuat dengan tingginya asas solidaritas. Seperti yang diuraikan di atas, SDGs merupakan visi global bersama yang mewakili kepentingan semua pihak. Sebagai tambahan, negara-negara yang hadir di dalam the UN Sustainable Development Summit sependapat bahwa SDGs adalah perjalanan bersama hingga 2030 dan berjanji bahwa tidak akan ada satu negara pun yang tertinggal. Inilah pilar kedua SDGs yang disebut dengan no one is left behind. Pilar kedua ini semakin memperlihatkan bahwa SDGs harus dipahami sebagai visi bersama, bukan visi ambisius yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Target pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi secara holistik merupakan pilar SDGs yang terakhir. SDGs yang telah disusun dengan 17 tujuan sangat memperhatikan aspek keterkaitan antar tujuan. Hal ini berbeda dengan MDGs yang kurang memperhatikan keterkaitan antar tujuan. Dengan kata lain, usaha untuk meraih sebuah tujuan memiliki hubungan yang erat dengan usaha untuk meraih tujuan yang lainnya. (Alisjahbana and Murniningtyas 2018).

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan **pendekatan deskriptif**. Penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan (Ismail 2009). Penelitian ini memfokuskan pada nagari yang dipimpin oleh walinagari perempuan untuk menganalisis strategi, kebijakan, dan taktik yang digunakan dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) di Nagari tersebut. Objek penelitian utama adalah wali nagari

perempuan, yang menjadi informan kunci untuk memberikan wawasan mendalam tentang peran, pengalaman, tantangan, dan strategi yang mereka hadapi dalam mewujudkan SDGs desa. Selain wali nagari perempuan, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan perangkat nagari, mitra pemerintah seperti Camat, dan Kepala Bidang Pemerintahan Nagari di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB Pesisir Selatan). Mereka memberikan sudut pandang tambahan tentang kolaborasi, dukungan, dan sinergi yang terlibat dalam mencapai SDGs desa. Terdapat juga informan pendukung yang, meskipun mungkin tidak memiliki pemahaman atau pengalaman mendalam seperti informan kunci, tetapi memberikan wawasan berharga. Mereka termasuk masyarakat dengan pengetahuan tentang peran kepemimpinan walinagari perempuan dan dampaknya secara lokal. Selain itu, pakar atau praktisi terkait, seperti akademisi, ahli pembangunan, atau pemangku kepentingan lainnya, juga diwawancarai untuk memberikan perspektif yang berharga tentang isu-isu terkait kepemimpinan walinagari perempuan dan implementasi SDGs di tingkat desa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil

Nagari adalah bentuk organisasi kehidupan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Desa yang berlaku di Sumatera Barat. Nagari merupakan unit pemerintah terendah di bawah kecamatan dan juga kesatuan wilayah kesatuan adat dan sekaligus kesatuan administrasi pemerintah (ASE 2011). Secara struktural, lembaga pemerintahan nagari dipimpin oleh walinagari sebagai kepala eksekutif dan badan musyawarah nagari sebagai kepala legislative. Setiap walinagari dibantu oleh seorang sekretaris nagari. Namun Lembaga Kerapatan Nagari yang dulunya merupakan struktur tertinggi dalam nagari sekarang berubah menjadi lembaga unsur nagari, artinya KAN berada dibawah kendali walinagari bersama lembaga nagari lainnya. Walinagari mempunyai masa jabatan enam tahun dan dipilih langsung oleh masyarakat nagari melalui pemilihan umum (A. Fitri, Frinaldi, and Erianjoni 2019). Realita yang terjadi dalam proses pemilihan walinagari, selalu didominasi dari kaum laki-laki. Namun belakangan ini, kaum perempuan juga mulai menunjang eksistensinya dalam proses pemilihan walinagari. Terlepas mereka merupakan seorang bundo kanduang disukunya, istri dari suami dan ibu dari anak-anaknya. Adapun yang dikatakan masyarakat Minangkabau terhadap perempuan, baik dari segi positif maupun negatif, tapi ketika muncul sebuah keinginan untuk berkontribusi dalam masyarakat, maka apapun dapat dilakukan oleh perempuan minangkabau demi menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat (Robikah 2020).

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, dari 182 Nagari hanya 2 yang menjabat sebagai walinagari yang perempuan yakni Nagari Lalang Panjang Kecamatan Air Pura periode tahun 2018-2024 dan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan 2017-2023. Inilah bukti perempuan bisa menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat Minangkabau. Perempuan tidak harus menjadi anggota legislatif untuk eksistensi tersebut namun bisa melalui kedudukan lainnya seperti menjadi walinagari.

Pemilihan Walinagari merupakan bentuk dari proses demokrasi di sistem pemerintahan terendah Sumatera Barat. Secara umum walinagari diatur dalam Peraturan Daerah no. 1 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari. Namun secara khusus untuk proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Walinagari diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota masing-masing. Sebab tiap-tiap daerah di Sumatera Barat memiliki ciri khas tersendiri (Akbar 2019). Menjadi walinagari dalam sebuah wilayah nagari, pasti memiliki tanggungjawab yang besar kepada masyarakat. Nagari yang merupakan bentuk dari konstruksi sosial dari masyarakat Minangkabau dalam menerapkan regulasi politik sangat menjunjung tinggi *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah*. Dalam pemilihan walinagari terdapat

landasan adat yang mengatur, yang dinamakan dengan “*adat salingka nagari*” yang terdapat dan berkembang pada masing-masing nagari di Sumatera Barat (A. Fitri, Frinaldi, and Erianjoni 2019). Ada beberapa factor pendukung pendukung yang menjadikan perempuan dapat menjadi Wali Nagari (Kepala Desa) di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu *Perubahan dalam Norma dan Nilai Sosial*: Perubahan dalam norma sosial dan nilai-nilai yang mendukung kesetaraan gender telah meningkatkan peluang perempuan untuk terlibat dalam politik dan kepemimpinan. Masyarakat semakin menyadari pentingnya pemberian kesempatan yang sama kepada perempuan dalam hal kepemimpinan. Apalagi ada *Momentum Kesetaraan Gender Global* telah memperkuat kesadaran akan isu-isu gender. Komitmen internasional seperti Agenda 2030 dan tujuan SDGs menyoroti pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan (Srifitriani et al. 2021). Selanjutnya karena adanya *Dukungan dari Keluarga* terutama pasangan dan keluarga inti. Berdasarkan wawancara dengan semua informan terpilihnya kedua Wali Nagari Perempuan tersebut dikarenakan pengaruh track record/rekam jejak suami dimana Wali Nagari Lalang Panjang Merupakan Istri Pensiunan Kepala Polisi Sektor (KAPOLSEK Kecamatan Pancuang Soal) begitu juga Walinagari Tapan dimana Suaminya Pernah Menjadi Walinagari dan Anggota DPRD Pesisir Selatan. Dengan adanya track record Suami tersebut yang memiliki pengalaman dalam kepemimpinan mungkin memiliki jaringan dan koneksi yang berguna dalam dunia politik lokal. Ini dapat membantu calon walinagari dalam mengumpulkan dukungan politik dan sumber daya yang diperlukan untuk kampanye. Selain itu ada trust/Kepercayaan Masyarakat sehingga masyarakat lokal mungkin lebih cenderung untuk mendukung pasangannya dalam pencalonan sebagai walinagari. Pada dasarnya yang disampaikan oleh Walinagari itu sendiri adalah Keputusan untuk menjadi walinagari harus didasarkan pada minat, kemampuan, dan komitmen pribadi. Seseorang harus memiliki visi dan komitmen untuk memimpin dan melayani masyarakat dengan baik, terlepas dari pengaruh track record suami atau anggota keluarga lainnya. Kemudian Faktor Pendukung lainnya adalah *partisipasi dalam organisasi sosial dan masyarakat*: partisipasi perempuan dalam organisasi-organisasi sosial dan masyarakat lokal dapat membangun keterampilan kepemimpinan dan jaringan yang diperlukan untuk berhasil dalam pemilihan. Sebagaimana yang dilakukan oleh kedua walinagari, mereka aktif dalam kegiatan Nagari khususnya dalam organisasi perempuan seperti majelis taklim, PKK, Bundo Kandung dan lain sebagainya. Sehingga Organisasi perempuan sering kali memberikan kesempatan dan mendapatkan dukungan dari sesama perempuan yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Dukungan inilah yang mengantarkan mereka untuk menjadi walinagari. Apalagi Walinagari Lalang Panjang beliau sudah menjabat selama 2 Periode dimana Keberhasilan dan prestasi perempuan dalam peran kepemimpinan sebelumnya telah membuktikan kemampuannya sehingga dapat memberikan *contoh positif* bagi perempuan lainnya. Namun ketika perempuan berada pada posisi manajemen atau struktur puncak kepemimpinan, maka tantangan yang dihadapinya dapat menjadi lebih berat. Tantangan itu adalah: **Pertama**, perempuan harus sanggup meyakinkan publik atau bawahannya, bahwa dia tidak akan menjalankan kepemimpinan yang berbeda, hanya karena dia seorang perempuan. Idealnya, dia akan lebih menampilkan keunggulan-keunggulan obyektif dibanding keunggulan khasnya sebagai perempuan. Hal itu dibuktikan oleh Nagari Lalang Panjang selama dua periode kepemimpinannya mendapatkan penghargaan Desa Terbaik pada periode pertama dan Desa Mandiri Kabupaten Pesisir Selatan Pada Periode ke kedua. **Kedua**, pemimpin perempuan seyogyanya memiliki kemampuan untuk meminimalisir kekhasan alamiahnya sebagai perempuan dalam melihat dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. **Ketiga**, karena perempuan memiliki daya tahan yang tinggi dan sanggup menghadapi tantangan dalam realita dan pertarungan panjang, mereka membekali diri dengan kemampuan perspektif yang lebih komprehensif. Perempuan bisa lebih sempurna dalam hal-hal yang bersifat detail dan fokus, tetapi dia bisa sangat lalai dalam memandang

persoalan yang lebih besar; **keempat**, perempuan harus menyadari penuh bahwa selain memegang tanggung jawab publik, dia tidak boleh melupakan peran domestiknya sebagai seorang wanita. Sehingga harus ada keseimbangan bagi perempuan dalam mengelola perannya sebagai peran publik dan peran domestik (Lang 2021).

Kepemimpinan yang diterapkan di kedua Nagari tersebut adalah kepemimpinan Situasional dimana Kepemimpinan seorang Wali Nagari yang situasional merujuk pada kemampuannya untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dan tindakan berdasarkan situasi yang dihadapi (Mustakim, 2008) Ini adalah pendekatan yang fleksibel dan responsif yang memungkinkan seorang pemimpin untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang berbeda dalam berbagai konteks atau keadaan. Wali Nagari mengambil peran yang lebih otoritatif, mengambil keputusan cepat dan tegas untuk menangani masalah dengan efisien. Contohnya yang dilakukan oleh Walinagari Lalang Panjang mengambil alih pasar nagari untuk dikelola oleh Nagari dengan meminta bantuan dana pokok pikiran dari anggota dewan, kemudian untuk menyediakan akses air bersih Nagari Lalang Panjang dengan memasang PDAM untuk Masyarakat, Nagari satu-satunya yang mengakses PDAM pada saat itu, kemudian merealisasikan pembangunan ke 27 unit Rumah Tidak layak Huni.

Dalam situasi di mana diperlukan kerja sama lintas sektor atau pemangku kepentingan yang beragam, Wali Nagari Lalang Panjang dan Nagari Tapan mengadopsi gaya kepemimpinan kolaboratif dengan tipe Kepemimpinan Inovatif-progresif Kepemimpinan ini lebih melibatkan partisipasi/prakarsa masyarakat Desa. Dalam hal prinsip transparansi akan selalu meminta kepada masyarakat untuk mengawasi, akuntabilitas kinerja disampaikan kepada publik dilakukan setiap saat (SARI 2022). Pembangunan Nagari dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari merencanakan, melaksanakan serta mengawasi proyek pembangunan. Seluruh unsur masyarakat diajak secara bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban dalam Nagari. Melibatkan setiap unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, hingga perwakilan masyarakat dalam Musyawarah Nagari/ Desa. Hal ini juga sejalan dengan spirit yang dibangun untuk pembaharuan Desa yang meletakkan Musdes diatas segalanya. Setiap orang akan dijamin kebebasan berpendapatnya dan mendapatkan perlakuan yang sama, serta akan melindungi Kepemimpinan ini lebih melibatkan partisipasi/prakarsa masyarakat (I. Iskandar 2012). Dalam hal prinsip transparansi akan selalu meminta kepada masyarakat untuk mengawasi, akuntabilitas kinerja disampaikan kepada publik dilakukan setiap saat. Pembangunan Desa dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari merencanakan, melaksanakan serta mengawasi proyek pembangunan. Seluruh unsur masyarakat diajak secara bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban Desa (Desa 2017). Setiap orang akan dijamin kebebasan berpendapatnya dan mendapatkan perlakuan yang sama, serta akan melindungi kepemimpinan desa dari intimidasi. Mengedepankan akuntabilitas kinerja, hasil Musyawarah Desa serta tindak lanjut keputusan musyawarah akan disampaikan kepada masyarakat dan dilakukan setiap saat. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai konsensus dan solusi bersama yang berkelanjutan (PERDESAAN n.d.).

Sebagaimana yang disampaikan oleh kedua Wali Nagari bahwa sekecil apapun itu permasalahan wajib untuk didiskusikan, dimana keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dengan seluruh Pemerintahan Nagari, Tokoh Masyarakat, Lembaga Nagari dan Seluruh Masyarakat. Dalam upaya jangka panjang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan seperti SDGs, kedua Wali Nagari mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional. Ini melibatkan menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk mencapai perubahan positif dengan visi yang kuat dan komitmen jangka panjang.

Dalam situasi di mana pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama, Wali Nagari perempuan mengadopsi pendekatan pelayanan. Mereka mendengarkan dan merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta berusaha untuk memenuhi harapan tersebut. Contohnya saja di Nagari Lalang Panjang 60% Mata Pencahariannya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, 20 % Petani dan 20 % lagi serabutan, nah untuk yang 20% serabutan ini pemerintah Nagari menganggarkan dari dana desa untuk ketahanan pangan dengan membuat kelompok-kelompok usaha, untuk kelompok-kelompok masyarakat yang mengajukan proposal UMKM untuk dibantu modalnya sehingga dengan adanya kelompok usaha bersama ini dapat menarik lapangan kerja. Dalam hal ini wali nagari berperan sebagai monitor memantau bantuan tersebut digunakan sebagaimana semestinya.

Dalam konteks partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, kedua Wali Nagari tersebut memfasilitasi dialog dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Mereka berperan sebagai fasilitator dan mendukung partisipasi aktif masyarakat. Contohnya dalam musrembang kemudian pendataan untuk sistem informasi desa dari Kementerian Desa yang melibatkan masyarakat setempat untuk dilakukan perekrutan dan pelatihan. Dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat, Wali Nagari mengadopsi pendekatan yang berfokus pada analisis data. Ini melibatkan pengumpulan dan penggunaan data untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Contohnya saja di nagari lalang panjang pada data stunting di tahun 2022 itu sebanyak 7 orang berbagai upaya telah dilakukan untuk melakukan pengurangan angka stunting di nagari seperti memperbaiki Gizi anak dengan memberikan bantuan. namun pada tahun 2023 data stunting menunjukkan naik menjadi 12 orang. Karena merasa ganjal dari data tersebut, wali nagari mengkonfirmasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten untuk mengecek ulang data tersebut, dan ternyata memang benar jika ada kesalahan pengentrian dari dinas bukannya bertambah tapi sudah berkurang dari yang ditetapkan sebelumnya. Dari kasus tersebut tindakan yang dilakukan wali nagari lalang panjang adalah dengan meminta pengajuan Berita Acara tentang kesalahan pengentrian yang dilakukan oleh Dinas kepada Nagari Lalang panjang.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, mengamanatkan penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dalam rangka percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Milenial and Desa n.d.).

Pembahasan

Peran Kepemimpinan wali nagari perempuan sangat penting dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat desa. SDGs adalah serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Yang mana Wali Nagari Perempuan dalam mewujudkan SDGs di desa berperan sebagai:

1. Pengambil Keputusan dan Perencanaan Pembangunan Nagari

Wali nagari memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan SDGs. Mereka harus memprioritaskan tujuan SDGs dalam rencana pembangunan, termasuk upaya mengurangi kemiskinan,

meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang bersih. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa nagari lalang panjang telah mengimplementasikan rencana pembangunan desa seperti penanganan masalah stunting, mengalokasikan dana desa untuk bantuan modal untuk kelompok usaha bersama masyarakat, mengambil alih pasar untuk dikelola oleh Nagari, Menyediakan Air Bersih untuk masyarakat melalui PDAM, merenovasi Rumah Tidak Layak Huni dan lain sebagainya. Namun terdapat Masalah yang dihadapi oleh wali nagari (atau kepala desa) dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan nagari Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya, terutama anggaran. Nagari seringkali memiliki anggaran yang terbatas untuk program-program pembangunan, dan walinagari harus memprioritaskan proyek-proyek yang akan diimplementasikan. Kemudian ketidaksetaraan akses sumberdaya dalam konteks kepemimpinan nagari dapat terjadi ketika akses terhadap dana pembangunan, proyek-proyek infrastruktur atau bantuan pemerintah tidak didasarkan pada kriteria yang adil dan transparan, melainkan dipengaruhi oleh faktor politik atau patronase. Dari hasil wawancara, wali nagari yang memiliki hubungan politik yang kuat atau terhubung dengan partai politik tertentu dapat memiliki akses lebih besar ke sumber daya dan dukungan pemerintah. Hal ini dapat mengakibatkan nagari yang memiliki wali nagari yang lebih "berhubungan" mendapatkan lebih banyak sumber daya dibandingkan nagari lainnya. **Keterbatasan Pengetahuan dan Kapasitas** dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Ini bisa termasuk pemahaman tentang konsep-konsep pembangunan berkelanjutan dan teknis perencanaan. **Keterbatasan Akses Informasi** terkadang, wali nagari menghadapi keterbatasan akses informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang berbasis data sehingga mempengaruhi perencanaan yang efektif dikarenakan jaringan internet yang sangat terbatas. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pihak kecamatan dan DPMD melakukan upaya-upaya dengan **Penguatan Kapasitas dengan** memberikan pelatihan dan pendidikan kepada wali nagari dalam bidang perencanaan pembangunan berkelanjutan, tata kelola yang baik, dan manajemen sumber daya. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dengan** mendorong transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan dan program-program pembangunan, serta mempromosikan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. **Kemudian melibatkan masyarakat secara aktif** dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga masyarakat dapat memiliki kontrol lebih besar atas pembangunan nagari mereka. Mendorong adopsi kebijakan dan peraturan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan dalam nagari. Selanjutnya menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat untuk memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan. **Kolaborasi dan Kemitraan, dengan** mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, untuk mendukung pembangunan nagari yang berkelanjutan. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, wali nagari dapat lebih efektif dalam peran mereka dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan nagari yang berkelanjutan.

2. Memprioritaskan program nasional melalui pendataan desa

Peran walinagari dalam memprioritaskan program nasional melalui pendataan desa melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) atau instansi terkait adalah sangat penting. peran yang dilakukan oleh walinagari dalam konteks ini adalah Mengoordinasikan Pendataan Desa *dimana* mereka dapat memobilisasi masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data yang diperlukan

untuk SDGs. Kemudian Walinagari *Mengidentifikasi Kebutuhan Lokal* seperti mengidentifikasi masalah-masalah utama yang perlu diatasi dan tujuan-tujuan SDGs yang paling relevan untuk nagarinya. Selanjutnya Walinagari berperan dalam *Mengedukasi Masyarakat dengan* meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tujuan-tujuan SDGs dan pentingnya pendataan desa. Serta walinagari dapat mengorganisir forum-forum partisipasi masyarakat yang memungkinkan masyarakat Nagari untuk memberikan masukan tentang masalah-masalah pembangunan dan prioritas-prioritas mereka. Ini dapat membantu memastikan bahwa pendataan desa mencerminkan kebutuhan sebenarnya. Seperti pendataan kemiskinan ada yang tergolong miskin, sudah tidak miskin, dan hampir miskin semua itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama pemangku kepentingan Nagari yakni Kapalo Kampung. Selain Wali Nagari juga *Mengumpulkan Data Kualitatif* dan cerita dari masyarakat melalui wawancara dan diskusi dengan masyarakat. *Koordinasi dengan Pihak-Pihak Terkait* Walinagari juga dapat berperan dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak tersebut seperti pemerintah daerah, Kemendes PDTT, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan bahwa data yang terkumpul digunakan dalam perencanaan pembangunan. Selanjutnya setelah data terkumpul, walinagari dapat berperan dalam menyampaikan data ini kepada pihak berwenang, termasuk pemerintah pusat, untuk memastikan bahwa desa mereka mendapatkan perhatian yang layak dalam alokasi sumber daya dan program-program nasional. Setelah program-program nasional dilaksanakan di tingkat desa, walinagari juga dapat memainkan peran dalam memonitor kemajuan dan hasilnya. Mereka dapat membantu memastikan bahwa program-program tersebut mencapai tujuan SDGs yang ditetapkan. Walinagari tidak lupa melaporkan kemajuan dalam pencapaian tujuan SDGs di tingkat desa kepada pihak berwenang dan masyarakat setempat. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan berperan aktif dalam pendataan desa yang berfokus pada SDGs, walinagari dapat menjadi penghubung yang penting antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Mereka dapat memastikan bahwa data yang terkumpul mencerminkan kebutuhan dan aspirasi desa mereka, dan bahwa program-program nasional diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa (Nagari). Meskipun peran walinagari dalam memprioritaskan program nasional melalui pendataan desa melalui SDGs Kemendes memiliki potensi yang besar, ada beberapa permasalahan yang dapat dihadapi dalam proses ini. Beberapa permasalahan yang timbul termasuk: *Keterbatasan Sumber Daya* dalam hal personel, anggaran, dan teknologi. Ini dapat menghambat kemampuan walinagari untuk secara efektif mengkoordinasikan dan melaksanakan pendataan desa yang komprehensif. *Keterampilan dan Pengetahuan Terbatas* dalam pengumpulan dan analisis data, terutama data yang berkaitan dengan indikator SDGs sehingga mengurangi kualitas data yang dihasilkan. *Partisipasi Masyarakat yang Rendah karena* Memotivasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pendataan desa dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka tidak melihat nilai langsung dari proses tersebut atau jika ada ketidakpercayaan terhadap penggunaan data mereka. Kemudian *Ketidaketaraan Akses Teknologi* terbatas seperti komputer atau internet dapat menjadi kendala dalam pengumpulan data dan pelaporan, terutama di Nagari paling ujung dari Kabupaten ini. *Selain itu* Keterlibatan dan koordinasi yang kurang dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah atau organisasi non-pemerintah mengurangi efektivitas pendataan desa. Data yang dihasilkan memiliki kualitas yang rendah karena tidak ada prosedur pengumpulan data yang baik dan pelatihan yang memadai bagi walinagari dan petugas desa. Setelah data terkumpul, kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan berkelanjutan di Nagari juga menjadi permasalahan. Meskipun

data telah dikumpulkan, belum tentu digunakan secara efektif dalam merumuskan kebijakan atau mengalokasikan sumber daya untuk program-program pembangunan yang sesuai dengan SDGs. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, diberikanlah pelatihan dan dukungan yang memadai kepada walinagari dan perangkat Nagari, mempromosikan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data dan sumber daya, serta memastikan bahwa data digunakan secara efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang berkelanjutan.

3. Mengadaptasikan kebiasaan baru di tingkat Nagari melalui konsep “Desa Mandiri”

Desa Mandiri adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memungkinkan masyarakat desa menjadi lebih mandiri, tangguh, dan berdaya dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam hal ini Wali nagari dapat memainkan peran penting dalam mendorong masyarakat desa untuk mengadaptasi kebiasaan baru yang lebih berkelanjutan seperti melalui program-program edukasi dan komunikasi yang melibatkan masyarakat, termasuk pemahaman tentang kebiasaan baru yang lebih berkelanjutan. Memberikan pelatihan kepada masyarakat desa dalam berbagai keterampilan yang relevan dengan adaptasi, seperti pertanian berkelanjutan, manajemen sumber daya alam, teknologi informasi, dan manajemen risiko bencana. Ini akan membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dan dapat menghadapi perubahan. Mendorong pengembangan usaha ekonomi lokal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di tingkat nagari. Ini dapat mencakup diversifikasi ekonomi, penggunaan teknologi hijau, dan pemasaran produk-produk lokal (Annisa Fitri and Ekasakti 2023) memastikan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, energi, dan akses keuangan tersedia untuk mendukung inisiatif "Desa Mandiri". Infrastruktur yang baik akan membantu masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan dengan lebih baik. Selalu Melibatkan perempuan dan pemuda dalam proses adaptasi dan memberikan peluang kepada mereka untuk berkontribusi dalam pengembangan desa mandiri. Ini termasuk dalam pengambilan keputusan dan pengembangan keterampilan. Mengadopsi praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan di tingkat nagari. Ini termasuk pengelolaan hutan, pertanian berkelanjutan, dan konservasi alam. Mendorong kerja sama dan kolaborasi antara nagari-nagari dalam wilayah yang sama, serta dengan pihak-pihak eksternal seperti pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swasta. Ini dapat membantu dalam pertukaran informasi dan sumber daya. Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan "Desa Mandiri". Ini akan membantu dalam menilai efektivitas program-program yang diterapkan. Mengembangkan rencana aksi "Desa Mandiri" yang jelas dan berbasis data, dengan tujuan-tujuan yang spesifik dan indikator yang terukur untuk mengukur kemajuan. *Pengarusutamaan Lingkungan*: Memasukkan pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan dalam semua aspek kebijakan dan kegiatan di tingkat nagari. Dengan Desa Mandiri dapat Mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung konsep "Desa Mandiri" dan adaptasi kebiasaan baru di tingkat nagari. Hal ini melibatkan keterlibatan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya(Theodoridis and Kraemer n.d.). Adaptasi kebiasaan baru di tingkat nagari melalui konsep "Desa Mandiri" adalah pendekatan holistik yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa untuk menghadapi perubahan dan mencapai keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan melibatkan seluruh komunitas dan mendukung perkembangan yang berkelanjutan, desa dapat menjadi lebih mandiri dan tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan. Namun Penerapan konsep "Desa Mandiri" dan adaptasi

kebiasaan baru di tingkat nagari atau desa dapat menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Beberapa masalah yang timbul adalah: *Keterbatasan Sumber Daya* termasuk anggaran terbatas, infrastruktur yang kurang memadai, dan tenaga kerja yang terbatas. Ini yang menghambat kemampuan untuk menerapkan program-program adaptasi yang efektif. *Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman* dari masyarakat desa yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya adaptasi kebiasaan baru atau konsep "Desa Mandiri" kemudian *Keterbatasan Teknologi* modern seperti internet atau telekomunikasi menghambat pengumpulan data, pertukaran informasi, dan pelaksanaan program adaptasi yang berbasis teknologi. *Keterlibatan Pihak-Pihak Terkait* seperti keterlibatan pemerintah daerah, NGO/organisasi non-pemerintah, dan lembaga swasta dalam mendukung program-program adaptasi di tingkat nagari tidak selalu optimal. Kurangnya kemitraan dan dukungan dari pihak-pihak terkait dapat menjadi hambatan. *Kurangnya Kapasitas* teknis dan manajerial untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola program-program adaptasi termasuk pemahaman tentang praktik-praktik berkelanjutan dan teknologi terbaru. *Perubahan Sosial dan Demografi Desa*, seperti urbanisasi atau migrasi, juga dapat mempengaruhi upaya adaptasi dan pembangunan desa mandiri. Selanjutnya *Pengaruh Globalisasi* yang membawa dampak positif maupun negatif terhadap Nagari, termasuk dalam hal ekonomi dan budaya. Berdasarkan Permasalahan Tersebut perlu pemahaman dan penanganan masalah-masalah ini dengan melakukan kerjasama antara masyarakat Nagari, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Upaya bersama untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dapat membantu memastikan bahwa desa dapat berhasil beradaptasi dengan perubahan dan mencapai tingkat mandiri yang lebih tinggi. Dengan demikian, peran kepemimpinan Wali Nagari perempuan tidak hanya relevan untuk mencapai tujuan SDGs di tingkat desa, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk implementasi konsep "Desa Mandiri" yang menekankan pada kemandirian ekonomi, sosial, dan lingkungan desa sehingga diharapkan desa atau nagari dapat lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan baru dengan memaksimalkan potensi lokal dan membangun keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan desa.

Penutup

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, dari 182 Nagari hanya 2 orang yang menjabat sebagai walinagari perempuan yakni Walinagari Lalang Panjang dan Walinagari Tapan. Inilah bukti bahwa perempuan bisa menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat Minangkabau. Kepemimpinan yang diterapkan di kedua Nagari tersebut adalah kepemimpinan situasional dimana seorang Walinagari situasional merujuk pada kemampuannya untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dan tindakan berdasarkan situasi yang dihadapi dengan mengadopsi gaya kepemimpinan kolaboratif dan transformasional dengan tipe Kepemimpinan Inovatif-progresif. Dalam konteks partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, kedua Wali Nagari tersebut memfasilitasi dialog dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Mereka berperan sebagai fasilitator dan mendukung partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu peran kepemimpinan wali nagari (atau kepala desa) perempuan sangat penting dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat desa. SDGs adalah serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Wali Nagari perempuan dalam mewujudkan SDGs di desa berperan sebagai pengambil keputusan dan perencanaan pembangunan nagari. Kemudian memprioritaskan program nasional melalui pendataan Desa.

Peran yang dilakukan oleh walinagari dalam konteks ini adalah mengoordinasikan pendataan desa, mengidentifikasi kebutuhan lokal, mengedukasi masyarakat, melibatkan masyarakat, mengumpulkan data kualitatif, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Menyampaikan data kepada Pemerintah Pusat, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan Kemajuan. Selanjutnya mengadaptasi kebiasaan baru di tingkat nagari melalui DPMD Kabupaten Pesisir Selatan dan *Stakeholder* yang lainnya dengan upaya penguatan kapasitas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi dan kemitraan.

Daftar Kepustakaan

- Akbar, K. 2019. *Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan (Female Leadership) Di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diateh Kabupaten Solok Periode 2014-2020*. scholar.unand.ac.id. <http://scholar.unand.ac.id/54564/>.
- Alisjahbana, Armida Salsiah, and Endah Murniningtyas. 2018. *3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*.
- ASE, K D. 2011. *GAYA KEPEMIMPINAN WALI NAGARI PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI (Studi Pada Kenagarian Tanjung Bingkung* scholar.unand.ac.id. <http://scholar.unand.ac.id/83699/1/POLITIK> 2011 ASE KASUMA DEWI 06993031 OK.pdf.
- Fitri, A., A. Frinaldi, and Erianjoni. 2019. "Wali Nagari Women's Leadership Style in the Development of Nagari Government in Nagari Tigo Balai, Matur Sub-District, Agam Regency." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 314(1).
- Fitri, Annisa, and Universitas Ekasakti. 2023. "PROGRAM UPPKS DI KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN." 5(4): 2631–39.
- Iskandar, A H. 2020. *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=yfoIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sdgs+desa+pesisir+selatan+perempuan&ots=YGGLx6oz8G&sig=cm-wcjDRDtVPgrPrisCI3uGbKk>.
- Iskandar, Israr. 2012. "WALI NAGARI PEREMPUAN DI ERA REFORMASI : Studi Kasus Terpilihnya Wali Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 WOMEN WALI NAGARI IN REFORM ERA : CASE STUDY OF THE ELECTED OF BATU BASA WALI NAGARI." : 97–110.
- Ismail, R. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=amoWLP1l-aEC&oi=fnd&pg=PR4&dq=metode+penelitian+sosial&ots=cwifaM8YZA&sig=LEnYUSZbmEbiAeKrVmy3WZhUoWs>.
- Kurniawan Borni, 2015, BUKU 5 DESA MANDIRI, DESA MEMBANGUN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA JI.
- Lang, S B Lang. 2021. *KEPEMIMPINAN WALI NAGARI PEREMPUAN DI KENAGARIAN BATU BASA KECAMATAN PARIANGAN TAHUN 2009-2015*. scholar.unand.ac.id. <http://scholar.unand.ac.id/98490/>.
- Mahmud, I. 2022. "Implementasi Regulasi Pembangunan Desa." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/3311>.
- Mayasiana, N A, and N Hofia. 2022. "Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember." *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*. <http://128.199.195.171/index.php/dianilmu/article/view/239>.
- Milenial, P G, and MSDG Desa. "BUKU PANDUAN UNNES GIAT." *mipa.unnes.ac.id*. <https://mipa.unnes.ac.id/v3/wp-content/uploads/2022/01/Buku-Panduan->
-

GIAT_SDGs-Desa.pdf.

- PERDESAAN, PDANA D I. "PANDUAN I KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PERDESAAN PANDUAN II." *kemenpppa.go.id*.
<https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/5a70e-modul-kepemimpinan-perempuan-di-desa-jilid-1.pdf>.
- Robikah, S R S. 2020. "REKONSTRUKSI KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM QS. AN-NISA [4]: 34 DAN QS. AN-NAML [27]: 23-44 PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI." <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/775503>.
- SARI, D N. 2022. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Mengambil Keputusan Dalam Ranah Publik Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. repo.iainbatusangkar.ac.id.
<https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/25547>.
- Srifitriani, A et al. 2021. *Kontribusi Ilmuwan Dan Praktisi Untuk 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=QpZSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=sdgs+desa+pesisir+selatan+perempuan&ots=tphKi-QBnr&sig=fZoq81dpqYrRpoqnSkPZL-uPlps>.
- Wahyuni, D. 2018. "Arus Kesadaran Dalam Agama Ketujuh." *Aksara*.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1617278&val=10449&title=ARUS KESADARAN DALAM AGAMA KETUJUH](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1617278&val=10449&title=ARUS%20KESADARAN%20DALAM%20AGAMA%20KETUJUH).
- Wulandari, F, and A Frinaldi. 2020. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Dinas Perempuan Terhadap Budaya Kerja Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasaya." *Jurnal Manajemen dan Ilmu*
<http://jmiap.pj.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/137>.
- Zaini Mustakim. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi REPUBLIK INDONESIA